



David Efendi, dkk

DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia

Pengantar:
Bambang Eka Cahya Widodo
Tunjung Sulaksono



Published by
SAMUDRA BIRU

DEMOKRASI **DAN *CIVIL SOCIETY***

**Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia**

Published by
SAMUDRA BIRU

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY*

**Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia**

David Efendi, dkk.

Editor:

David Efendi
Sanny Nofrima

Pengantar:

Bambang Eka Cahya Widodo
Dr. Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si.



Published by
SAMUDRA BIRU

DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia

©. David Efendi, dkk.

xxiv + 572 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-261-440-6

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2022

Penulis : David Efendi, dkk.

Editor : David Efendi
Sanny Nofrima

Sampul : Bagus Satrio

Layout : Bagus Satrio

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

Published by
SAMUDRA BIRU

PRAKATA EDITOR

Sebagai penguatan tradisi intelektual publik, di Prodi Ilmu Pemerintahan kami secara rutin setiap semester mengundang penulis dari beragam latar belakang untuk bergabung dalam proyek penulisan buku. Seri buku ini adalah yang keempat selama pandemik Covid-19 berlangsung. Kami sebagai editor yang ditunjuk prodi merasa sangat senang dan menikmati kerenyahan beragam tulisan dari beragam generasi dan asal universitas. Dalam *book chapter* yang kami edit kami menemukan payung setidaknya tercermin dalam judul buku dan pembagian bab di dalamnya. Semoga ini ikhtiar terbaik kita semua untuk mengapresiasi beragam tema dan karya yang dikirim kontributor. Beberapa catatan editor secara singkat sebagai berikut.

Dalam bab pertama yang diberikan judul *Governance*, Krisis, dan Inovasi di Masa Pandemi Covid-19 memuat sembilan artikel yang sebagian disatukan oleh gagasan tentang tata kelola atau kolaborasi dan beragam model inovasi serta sebagian ditulis dalam konteks respon atas krisis yang terjadi baik bencana alam atau bencana pandemi yang sejatinya tak dapat dipisahkan dari kondisi ekologi secara holistik.

Bab kedua disematkan judul Politik Elektoral di Masa Pandemi Covid-19 memuat dua tulisan yang sangat monumental perihal praktik demokrasi elektoral dan evaluasi kepemiluan yang terdiri dari tulisan Bambang Eka dan Edward Trias P. yang mengoreksi praktik desa anti-politik uang perspektif netizen dengan mendayagunakan kecanggihan mesin pelacak opini media. Sementara Ridho Al-Hamdi dan Sakir menganalisis faktor penyebab suara tidak sah dalam pilkada serentak di era pandemi khususnya di Kabupaten Sleman.

Bab ketiga yang menghadirkan lima buah tulisan ini dikerangkai dalam judul bab Demokrasi dan Gender di Masa

Pandemi Covid-19. Demokrasi yang dibaca secara langsung dan menggunakan mesin digital atau mengobservasi keragaman dinamika demokrasi di ruang-ruang *cyber politics*, juga pembacaan dalam konteks politik lokal di era desentralisasi sangat menarik karena keragaman situasi politik lokal. Terakhir adalah Bab 4 yang terdiri dari tujuh artikel yang mendiskusikan peran masyarakat sipil, kekuatan-kekuatan demokratis, dan arus informasi komunikasi di saat pandemi yang mengisyaratkan bahwa diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas kekuatan, dan gagasan demokratisasi informasi untuk mendapatkan ketangguhan masyarakat dan tata pemerintahan yang partisipatif.

Dari total naskah yang masuk kami berusaha mengakomodir sebagai apresiasi dan apabila dalam penyuntingan, *editing*, terdapat kurang dan salah mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih kepada penulis dan prodi Ilmu Pemerintahan UMY yang memungkinkan buku ini dapat hadir di tengah-tengah kita semua.

Yogyakarta, 10 Maret 2022

Tim Editor

Published by
SAMUDRA BIRU

KATA PENGANTAR

DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY KEBANGKITAN POLITIK MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA DI TENGAH KEMUNDURAN DEMOKRASI

Politik masyarakat sipil, sempat terpinggirkan dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan yang cenderung berfokus pada ranah masyarakat politik dan domain kekuasaan. Menguatkan kajian ekonomi politik, mendorong kajian-kajian ilmu politik dan pemerintahan bergeser ke domain masyarakat ekonomi dan dinamika kekuasaan yang mengikutinya. Berabad-abad kemudian negara dan masyarakat sipil kurang mendapat perhatian, bahkan kajian tentang masyarakat sipil sering dianggap sebagai kajian pinggiran dari ilmu politik dan pemerintahan. Namun begitu seiring dengan merosotnya kualitas demokrasi kita, seiring dengan kemunduran demokrasi yang sedang kita alami, para ilmuwan politik mulai melirik kembali peran *civil society* dalam mendukung dan mempertahankan demokrasi.

Kekhawatiran akan gagalnya demokrasi dan kemunduran demokrasi, membuat kajian tentang *civil society* kembali mendapat perhatian. Keterlibatan masyarakat sipil seolah menjadi pe-nawar terhadap persoalan kemunduran demokrasi ketika instrumen demokrasi lainnya mengalami kemerosotan peran yang signifikan. Partai Politik yang dikuasai oleh para oligarki, Parlemen yang semakin tidak bisa dipercaya, Pemerintah yang korup, Pers yang gagal berfungsi sebagai penyeimbang, dan sistem pengadilan yang juga kehilangan kepercayaan publik seolah menempatkan *civil society* sebagai pilar terakhir yang mempertahankan bangunan demokrasi dari kerusakan total.

Organisasi masyarakat sipil yang bercirikan voluntarisme dan egalitarianisme, merupakan tempat yang paling potensial untuk menyemai benih demokrasi. Kehadiran organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan merupakan sebuah kebutuhan, terutama untuk mencegah dan menutupi kegagalan negara maupun kegagalan pasar dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Di negara demokrasi baru seperti Indonesia, kewarganegaraan yang rapuh, institusi yang lemah, korupsi merajalela, dan warga negara yang merasa tidak berdaya adalah realitas politik saat ini. Membicarakan masyarakat sipil pada dasarnya adalah memperkuat politik kewarganegaraan, dengan harapan mendorong pemberdayaan masyarakat sipil terutama di hadapan negara dan pemilik modal. Persoalannya adalah apakah ada alternatif untuk kegagalan politik dan keterpisahan warga negara dari urusan publik? Tentu jawabannya tidak dan hampir mustahil memisahkan warga negara dari urusan publik.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan termasuk Indonesia menyajikan banyak fakta ketidakberdayaan negara dan kegagalan politik dalam menangani berbagai persoalan yang timbul, sejak pelayanan kesehatan, vaksin, maupun dalam pengendalian pandemi dalam hal ini pemberlakuan karantina atau pembatasan sosial. Di sisi yang lain para pengusaha yang berada pada domain masyarakat ekonomi, sibuk mengejar keuntungan berlimpah yang ditimbulkan dari ketakutan dan horor yang timbul akibat penanganan pandemi yang kacau balau.

Masyarakat sipil adalah sebuah hubungan dan kegiatan yang membentuk hidup kita, hal-hal yang kita lakukan sebagai warga sipil, secara bebas dan sukarela, dalam hubungan dengan orang lain, di luar negara dan pasar. Kesejahteraan sosial sangat ditentukan dalam dan melalui hubungan kita di masyarakat sipil. Pengalaman perawatan dan kepemilikan kita dibentuk oleh hubungan-hubungan ini. Selama lebih dari seabad, gerakan politik, pemerintah, dan kebijakan publik telah memfokuskan hampir secara eksklusif pada negara dan pasar, dan mengabaikan masyarakat sipil. Hubungan masyarakat sipil bersifat horizontal,

relasional, dan sukarela. Interaksi warga dengan negara bersifat vertikal dan koersif. Interaksi bisnis-pelanggan adalah pertukaran moneter (transaksional). Ketika gerakan politik, pemerintah, dan kebijakan publik memusatkan perhatian secara eksklusif pada negara dan pasar, mereka hanya berfokus pada negara-warga negara dan modal.

Bagaimana masyarakat sipil tertinggal dalam kajian politik? Kajian politik awalnya secara eksklusif berfokus pada negara dan pasar. Sektor publik atau sektor swasta sebagai solusi untuk setiap masalah. Kemudian perhatian para ilmuwan bergeser, melihat hanya individu dan pemerintah sebagai aktor sosial. Tidak dapat melihat asosiasi warga dan interaksinya dan tidak melihat individualisme dan kolektivisme sebagai sisi lain dari koin yang sama. Pada tahap selanjutnya politik menjadi persoalan publik dan sektor swasta. Mengabaikan sektor ketiga (rumah tangga, asosiasi, klub, badan amal, perusahaan sosial, koperasi). Mengabaikan keluarga dan usaha kecil serta wiraswasta (sektor yang luas dan terus berkembang tetapi yang tidak sesuai dengan tujuan manajemen). Yang berkembang kemudian adalah politik sebagai 'manajemen', pelaksanaan yang bersifat *top-down* dan administrasi gaya perusahaan. Partai politik sebagai instrumen manajemen mereka, berdasarkan budaya *top-down*, perintah-dan-kontrol. Partai-partai ini tidak lagi membutuhkan warga negara, dan sekarang terdiri dari operasi profesional, 'politisi karier', 'kelas politik'.

Politik masyarakat sipil pada dasarnya adalah merespons marginalisasi masyarakat sipil dari arena politik. Merespons tidak terwakilinya (representasi) masyarakat sipil dalam proses pembuatan keputusan. Merespons terhadap pengucilan masyarakat sipil dari pembuatan kebijakan publik. Politik masyarakat sipil pada prinsipnya adalah mencari dan menemukan representasi masyarakat sipil dalam politik. Politik masyarakat sipil pada prinsipnya adalah pembuatan kebijakan publik yang memperkuat posisi masyarakat sipil. Politik masyarakat sipil pada dasarnya adalah transfer kekuasaan dari negara dan pasar kepada

masyarakat sipil. Dengan demikian maka politik masyarakat sipil pada dasarnya adalah pembaruan demokrasi yang menempatkan warga negara dan masyarakat sipil di pusat proses politik. Pembaruan demokrasi masyarakat sipil itu ditandai tiga fitur utama yang penting yakni relasional, asosiasi formal maupun informal, dan sukarela (*volunterism*).

Aktivitas utama masyarakat sipil pada dasarnya dapat digolongkan dalam 10 kategori yang mungkin sangat luas variasinya yaitu: (1) Keluarga, kekerabatan, dan persahabatan (2) Ekonomi rumah tangga atau (3) Ekonomi domestik sekitar (*households*) dan dukungan sosial informal (4) Asosiasi sukarela, (5) LSM dan badan amal, (6) Kelompok swadaya dan kelompok pendukung (*self help group* dan *support group*), (7) Koperasi dan usaha bersama, (8) Perusahaan atau wirausaha sosial, (9) Wirausaha, perusahaan keluarga, usaha kecil, (10) Agama, iman, dan kerohanian.

Bagaimana masa depan politik masyarakat sipil? Pasca-pandemi Covid-19 kita bisa melihat beberapa perubahan penting antara lain terkait dengan jalinan masyarakat sipil ini terwakili dalam politik melalui kemampuan membentuk konstituensi sosial yang ada di masyarakat, menjaga kumpulan sumber daya budaya dan menjaga jaringan-jaringan intelektual yang luas. Karena itu politik masyarakat sipil memiliki tiga kekuatan utama yaitu: berpusat di masyarakat, merebut kekuasaan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tapi untuk masyarakat sipil, dan memiliki sumber daya budaya dan intelektual yang dapat digunakan untuk mereformasi politik. Kehadiran teknologi internet dapat memaksimalkan politik masyarakat sipil karena individu dan kelompok dapat terhubung dan berorganisasi secara *online*, lokal, nasional, dan global. Di samping itu biaya keuangan dari pengorganisasian politik dan kegiatan pemilihan dapat dikurangi dengan jaringan biaya yang lebih rendah dan *crowd-sourcing*.

Kebangkitan politik masyarakat sipil adalah cara untuk mendelegasikan kekuasaan kepada rakyat, sebagai cara alternatif

ketimbang mengalihkan kekuasaan kepada negara atau pasar. Dengan demikian kegagalan pasar dan kegagalan negara bisa dicegah dan masyarakat sipil bisa diperkuat. Seperti bayangan yang digambarkan oleh Alexis de Toqueville maupun Robert Putnam, bahwa kehadiran asosiasi-asosiasi sipil yang semarak dan dinamis yang akan mempertahankan semangat demokrasi, manakala masyarakat politik (negara) dan masyarakat ekonomi (pasar) menghadapi kegagalan dalam membangun dan menyejahterakan kehidupan bersama, semoga.

Yogyakarta, 4 Juni 2022

Bambang Eka Cahya Widodo
Ketua Bawaslu Republik Indonesia
Periode 2011-2012.

Published by
SAMUDRA BIRU

KATA PENGANTAR

Di berbagai negara pandemi Covid-19 sejatinya adalah dua sisi dari sebilah pedang. Pandemi pada satu sisi telah menjadi mimpi buruk yang menjelma menjadi kenyataan di berbagai sektor, terutama di bidang kesehatan dan perekonomian. Banyaknya jumlah korban jiwa yang jatuh akibat pandemi maupun terpuruknya sektor ekonomi menjadi bukti nyata dari dampak destruktif yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini, tak terkecuali di Indonesia.

Namun di sisi lain, harus diakui bahwa banyak pelajaran berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 yang menunjukkan upaya umat manusia untuk meretas jalan baru untuk dapat terus *survive* dalam sebuah situasi yang serba sulit sekalipun. Dalam perspektif *governance* misalnya, berbagai sektor tidak hanya diuji seberapa besar adaptabilitas dan agilitas mereka dalam berhadapan dengan pelbagai ketidakmenentuan yang ditimbulkan oleh situasi pandemi. Namun lebih dari itu berbagai aktor entah itu Negara, swasta, maupun *civil society* telah dipaksa untuk mengembangkan cara-cara baru dalam mengelola problem-problem yang muncul dari ketidakpastian tersebut.

Inovasi menjadi salah satu *blessing in disguise* yang lahir dari tekanan-tekanan yang muncul dari situasi pandemi sebagai wujud *lesson learned*. Inovasi ini sekaligus menjadi bukti otentik dan empiris bahwa umat manusia adalah makhluk yang pantang menyerah meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan kompleksitas persoalan kehidupan. Dengan demikian, inovasi sesungguhnya adalah deklarasi ulang bahwa manusia memang makhluk pembelajar, sehingga pantas untuk menyandang nama latinnya, *Homo sapiens*.

Buku berjudul *Demokrasi dan Civil Society: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia* yang saat

ini berada di tangan pembaca adalah sebuah upaya kesekian kalinya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk memotret pandemi. Kali ini, potret tersebut mengilustrasikan berbagai inovasi yang dihasilkan dari proses pembelajaran terhadap situasi pandemi. Meskipun mendudukan *civil society* sebagai pemeran utama dalam terbitan kali ini, akan tetapi sejatinya *civil society* tetap harus berbagi peran dan berkolaborasi dengan aktor-aktor lain agar inovasi-inovasi yang dihasilkan bisa lebih lengkap dan komprehensif, serta berdampak luas, di mana hal-hal tersebut juga berusaha untuk *dicapture* oleh buku ini.

Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah bersedia berkontribusi. Tentu saja, ucapan terima kasih dan apresiasi tersebut juga tertuju kepada para editor yang di tengah kesibukannya masing-masing telah meluangkan segenap waktu dan energinya untuk menjahit buku ini sehingga dapat mewujudkan menjadi buku yang saat ini ada di hadapan sidang pembaca. Akhirul-kalam, semoga buku yang bersahaja ini dapat bermanfaat bagi sidang pembaca dan menjadi sumber informasi serta mata air inspirasi untuk terus berkarya.

Bantul, 10 April 2022
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si.

Published by
SAMUDRA BIRU

DAFTAR SINGKATAN

ABPD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APD	: Alat Pelindung Diri
ADP	: <i>Areal Division of Power</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ABCGM	: <i>Academic, Bussiness, Community, Government and Media</i>
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
BLT-DD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSS	: Bantuan Sosial Sembako
BPT	: Basis Data Terpadu
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BI	: Bank Indonesia
CIP	: <i>Complex Intergovernmental Problems</i>
CDP	: <i>Capital Division of Power</i>
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
COSO	: <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>
CIPP	: <i>Context, Input, Process, dan Product</i>
CHSE	: <i>Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainable</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DDOS	: <i>Distributed denial-of-service</i>
EHAC	: <i>Electronic-Health Alert Card</i>
EIU	: <i>Economist Intelligence Unit</i>
FGD	: <i>Focus Group Discusion</i>

FPRB	: Forum Penanggulangan Resiko Bencana
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTM	: Harga Tiket Masuk
HLL	: <i>Hygiene, Low touch, and Less crowd</i>
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
ICM	: <i>Integrated Crisis Mapping</i>
ICT	: <i>Information, Communication and Technology</i>
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
JPS	: Jaring Pengaman Sosial
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KPC	: Komite Penanganan Covid-19
KIC	: Katadata Insight Center
KRI	: Komunitas Relawan Independen
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPPS	: Keputusan Pihak Penyelenggara Pilkada
KOMINFO	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
LP3ES	: Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
NDP	: <i>Non-Governmental Division of Power</i>
ODTW	: Obyek dan Daya Tarik Wisata
OECD	: Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
PAD	: Pendapatan Asli Desa
PDB	: Pendapatan Domestic Bruto
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PDTT	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PRB	: Pengurangan Risiko Bencana
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
PHBS	: Pola Hidup Bersih dan Sehat
PP	: Peraturan Pusat
PT	: Perseroan Terbatas
PMI	: Palang Merah Indonesia
PSBB	: Pemberantasan sosial Berskala Besar

PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKH	: Program Keluarga Harapan
PLBDN	: Pos Lintas Batas Darat Negara
QDAS	: <i>Qualitative Data Analysis Software</i>
RPD	: Rencana Pembangunan Desa
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
RI	: Republik Indonesia
SK	: Surat Keputusan
SMRC	: Saiful Mujani Research and Consulting
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
TKA	: Tenaga Kerja Asing
TGC	: Tim Gerak Cepat
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TI	: Teknologi Informasi
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNFPA	: <i>United Nations Fund for Population Activities</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WFH	: <i>Work From Home</i>
WFO	: <i>Work From Office</i>

Published by
SAMUDRA BIRU

DAFTAR ISTILAH

Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
COVID-19	: Salah satu fenomena dimana sebuah virus menyebar serta menyerang saluran pernapasan manusia.
Desa APU	: Desa Anti Politik Uang
Daring	: Suatu aktivitas atau kegiatan yang mengarah langsung pada jaringan internet, baik menggunakan smartphone, laptop, dan PC
GSoD	: Global State of Democracy
Kedungsepur	: Istilah umum yang merupakan singkatan dari beberapa nama wilayah otonom di eks-karesidenan.
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Limbah elektronik	: Sampah atau limbah yang berasal dari peralatan elektronik.
Lockdown	: Istilah <i>lockdown</i> dimaknai sebagai suatu kebijakan pembatasan bagi komunitas atau orang agar tetap berada di areanya selama bahaya ancaman masih terjadi.
Menko PMK	: Menteri Negara Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nataru	: Natal dan Tahun Baru

Publinteraksi
SAMUDRA BIRU

PPKM	: dilakukan untuk membatasi interaksi dan pertemuan yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
P-DTP	: Pajak Ditanggung Pemerintah
<i>Sagoe Cut</i>	: merupakan bagian dari perangkat daerah <i>Sagoe</i> (kabupaten) atau kota.
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
Seknas PEKKA	: Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
UMKM	: sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil.
UN Women	: Entitas Perserikaaan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan.
Varian Coblos	: Sebagai varian surat suara tidak sah terbanyak dibanding varian yang lainnya yang mengindikasikan faktor pemilih sebagai faktor dominan.
Website	: Kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet.

DAFTAR ISI

PRAKATA EDITOR	v
KATA PENGANTAR	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR ISTILAH	xix
DAFTAR ISI	xxi

BAB 1 GOVERNANCE, KRISIS, DAN INOVASI DI MASA PANDEMI COVID-19

Re-Design Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia

M. Daimul Abror 2

Inovasi Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Amarta” dan “Tirta Mandiri” dalam Menjaga Eksistensi di Masa Pasca Pandemi Covid-19

Juhari Sasmito Aji, Rossi Maunofa Widayat & M. Lutfie Khoiri 22

Penguatan Tata Kelola Kolaborasi Pariwisata-Bencana Menuju Next Normal di Kawasan “Kedungsepur”

Muchamad Zaenuri & Ganapati Sjastru Satyani..... 46

Manajemen Krisis Pemerintah dalam Menangani Covid-19 di Indonesia

Rahmawati Husein, Tatryana Rendi Ziar Zhafira & Tiara Khariunnisa ... 87

Kolaborasi Pentahelix sebagai Sarana Penguatan UMKM di Yogyakarta Pasca Pandemi Covid-19 di Yogyakarta

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani & Vindhi Putri Pratiwi.... 121

Kolaborasi Model Pentahelix dalam Penanganan Bencana

Suswanta 140

Menguji Relevansi Konsepsi Governance Melalui Praktik Penanganan Covid-19 di Indonesia <i>Aprilianto Satria Pratama</i>	164
Urgensi Pengesahan Permendikbud No. 30 di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Respon Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual di Indonesia <i>Eli Kardilla & Melania Novitasari</i>	184
Belajar dari Pandemi Covid-19: Komunikasi Krisis sebagai Alternatif Perspektif Komunikasi Pemerintahan di Masa Krisis <i>Dian Eka Rahmawati & Misran</i>	202
BAB 2 POLITIK ELEKTORAL DI MASA PANDEMI COVID-19	
Respon Netizen Terhadap Desa Anti Politik Uang dan Identifikasi Desa Anti Politik Uang <i>Bambang Eka Cahya Widodo & Moch Edward Trias Pahlevi</i>	228
Pandemi Covid-19 dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah Pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 <i>Ridho Al-Hamdi & Sakir</i>	248
BAB 3 DEMOKRASI DAN GENDER DI MASA PANDEMI COVID-19	
Refleksi Demokrasi: Represifitas dan Fenomena <i>Spiral Of Silence</i> <i>Titin Purwaningsih & Azka Abdi Amrurrobi</i>	284
Pendayagunaan Indeks Demokrasi Indonesia di Era Pandemi: Pelajaran dari Empat Kabupaten/Kota <i>David Efendi, Husni Amriyanto Putra & Fauzan Sandiah</i>	309
E-Demokrasi di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Melalui Analisis Media Daring <i>Bachtiar Dwi Kurniawan & Moch Edward Trias Pahlevi</i>	334

Perempuan di Masa Pandemi Covid-19: Ketimpangan Gender di Dalam Keluarga pada Tatanan Hidup Baru	
<i>Fajar Apriani</i>	353
Lokalisasi Demokrasi: Peran Identitas Budaya Dalam Gerakan Politik Keistimewaan Di Di Yogyakarta	
<i>David Efendi, Prawira Yudha Pratama & Bubu Alim Swarga</i>	371
BAB 4 CIVIL SOCIETY DAN DEMOKRATISASI INFORMASI DI MASA PANDEMI COVID-19	
Pengelolaan Website Corona Jogjaprov.go.id sebagai Media Sosialisasi Masyarakat dalam Mencegah Pandemi Covid-19	
<i>Reazha Nur Oktavianti & Yeni Rosilawati</i>	406
Deliberative Policy: Urgensi Konsistensi Data Covid-19 di Indonesia	
<i>Tri Sulistyarningsih & Umi Kulsum</i>	435
Evaluasi Program Smart Environment di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Program Penjemputan Limbah Elektronik E-Waste di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta)	
<i>Ummi Zakiyah & Danty Yuansah</i>	454
Daya Tahan Masyarakat Sipil Berbasis Komunitas dalam Gerakan Pertanian Kota di Yogyakarta	
<i>Lantip Fajar Utomo & David Efendi</i>	477
Respon Civil Society Terhadap Aplikasi PeduliLindungi Melalui Hastag Twitter #Pedulilindungi	
<i>Sanny Nofrima, Herdin Arie Saputra & Dian Eka Rahmawati</i>	488
Engagement Publik dalam Opini Media Sosial: Kebijakan PPKM Level 3 Natal dan Tahun Baru 2022	
<i>Mohamad Sukarno & Utami Nur</i>	507
Menutup Peluang Korupsi di Tengah Pandemi	
<i>Tunjung Sulaksono</i>	526

INDEKS	553
BIOGRAFI.....	559

Published by
SAMUDRA BIRU

RESPON CIVIL SOCIETY TERHADAP APLIKASI PEDULILINDUNGI MELALUI HASTAG TWITTER #PEDULILINDUNGI

Sanny Nofrima

Alumni Ilmu Pemerintahan dan Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Herdin Arie Saputra

Alumni Ilmu Pemerintahan dan Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dian Eka Rahmawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: sannynofrima21@gmail.com, herdinarieaputra@gmail.com,
dianekarahmawati@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia. Pemerintah dengan segala upaya mempunyai kewajiban untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu terobosan upaya pemerintah untuk membantu melakukan *Tracing* melalui sistem aplikasi telekomunikasi yang terhubung dengan pusat untuk melacak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon *civil society* terhadap aplikasi PeduliLindungi dengan menggunakan metode kualitatif untuk menemukan model dalam penggunaan media sosial sebagai komunikasi massa. Data dikumpulkan dari media sosial Twitter yang dianalisa menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian

ini mengungkapkan bahwa efektivitas penggunaan Twitter pada penyebaran informasi #pedulilindungi terbukti efisien, dimana berhasil menciptakan respon eksplisit (dapat diamati/mendorong tindakan) dengan nilai (=85 persen), dan respon implisit (tidak dapat diamati/tidak melakukan tindakan) sebesar (=15 persen) terhadap *civil society*. Selain itu juga menimbulkan relasi yang padat antar beberapa pengguna platform Twitter, yang menunjukkan bahwa mendapatkan respon yang tinggi dan menimbulkan jaringan yang luas dari pengguna platform Twitter.

Kata Kunci: *Civil Society, Teknologi Informasi Komunikasi, Twitter, Aplikasi Peduli Lindungi*

A. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 bukanlah topik yang mudah dipahami dan banyak disalahpahami, karena wabah ini telah menciptakan berbagai upaya pengobatan, pencegahan dan penularannya telah menjadi masalah hampir semua orang di seluruh dunia, memikirkan solusi dalam penanganan COVID-19. Termasuk perubahan perilaku yang signifikan selama pandemi COVID-19 untuk mengurangi penularan masyarakat dengan melakukan kegiatan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak (M. S. Thomas & Feng, 2021). Sejumlah besar informasi baru ke masyarakat untuk konsumsi yang cepat, pandemi ini mengeksplorasi bagaimana orang-orang yang paling terkena dampak pandemi menilai dan merasakan kualitas informasi mengenai COVID-19 dan mengatur informasi (Acharya et al., 2021). Masyarakat mendorong dan mendukung pemerintah dalam upayanya untuk mengalahkan pandemi dengan mendorong mereka untuk berpikir secara bijaksana dan logis dalam menghadapinya (Akbar et al., 2021). Pelacakan dan manajemen kontak yang komprehensif menggunakan teknologi pelengkap adalah komponen penting dari rencana respon epidemi selama deeskalasi atau permulaan gelombang pandemi COVID-19 berikutnya (Jian et al., 2020). Berbagai upaya di setiap negara di belahan dunia yang berdampak oleh COVID-19, penanganan dari

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat hingga pemanfaatan teknologi untuk mengurangi pandemi COVID-19.

Di Queensland (Australia), 69% masyarakat telah mengunduh aplikasi, sedangkan 31% tidak mengunduh. Alasan masyarakat yang mengunduh, dikarenakan mereka terbantu dengan adanya aplikasi, untuk membantu pelacakan kontak, dan berharap akan kembali normal. Sisa yang tidak mengunduh dengan empat topik alasan. Pertama, kurangnya kebutuhan yang dirasakan, dan masalah privasi. Kedua, masalah terkait telepon. Ketiga, pelacakan dan penyalahgunaan data. Keempat, yaitu kepercayaan, keamanan, dan kredibilitas (Smoll et al., 2021).

Sedangkan di Amerika Serikat, respon masyarakat mendukung terhadap aplikasi yang dioperasikan oleh U.S. Department of Veterans Affairs (VA). Aplikasi tersebut mendukung penghematan sumber daya yang substansial terhadap pemerintah. Dari masyarakat kelompok veteran yang mendukung tersebut, mereka lebih terhubung dengan pemerintah, percaya diri dengan menerima pesan protokol kesehatan (Saleem et al., 2020). Kedua dasbor telah memantapkan diri sebagai sumber daya informatika yang berharga. Misalnya, dasbor pribadi memungkinkan pemantauan epidemi di komunitas lokal yang terkait dengan fasilitas pengemasan daging. Dasbor publik menganalisis tren saat ini untuk memantau penularan penyakit dan rawat inap ditingkat masyarakat. Antara 21 Juni dan 22 Agustus 2020, alat-alat tersebut digabungkan untuk digunakan 133.637 kali oleh 74.317 pengguna. Penggunaan pendekatan dan teknologi informatika kesehatan masyarakat di Indiana berpotensi menguntungkan negara bagian (Dixon et al., 2021).

Sekitar setengah dari peserta merasa bahwa layanan *telehealth* bermanfaat selama pandemi COVID-19, dan 1545 (61,5 persen) melaporkan bahwa sistem tersebut merupakan cara yang efektif untuk berkomunikasi dan mengakses layanan perawatan kesehatan. Selain itu, 1435 (57,1%) peserta melaporkan merasa nyaman menggunakan sistem *telehealth*, dan 1129 (44,9%) melaporkan berhasil berkomunikasi. Serta juga, 1389 (55,3

persen) peserta menunjukkan bahwa sistemnya mudah dipahami, dan 1354 (53,9 persen) orang melaporkan memiliki kontak yang baik dengan dokter melalui sistem *telehealth*. Namun, hanya 1018 (40,5 persen) peserta yang menunjukkan bahwa mereka berkomunikasi lebih efektif menggunakan sistem kesehatan jarak jauh dibandingkan dengan cara tradisional (Elhadi et al., 2021).

Ada total 8.088 balasan, mewakili 26 kabupaten di Republik Irlandia. Dengan 54% responden menunjukkan bahwa mereka pasti akan mengunduh aplikasi pelacakan kontak, sementara 30% menunjukkan bahwa mereka mungkin akan mengunduhnya. 95% responden menyebutkan setidaknya satu alasan untuk mengunduh aplikasi semacam itu, dengan alasan yang paling sering dikutip adalah kemampuan aplikasi untuk membantu anggota keluarga dan teman, serta rasa kewajiban terhadap komunitas yang lebih besar. 59% menyebutkan setidaknya satu alasan untuk tidak mengunduh aplikasi, dengan alasan yang paling sering dikutip adalah kekhawatiran bahwa perusahaan teknologi atau pemerintah dapat mengeksploitasi teknologi aplikasi untuk pemantauan lebih lanjut selama epidemi. Keinginan kuat untuk mengunduh aplikasi yang didukung kesehatan masyarakat untuk membantu pelacakan kontak. Namun, kekhawatiran telah disuarakan bahwa privasi dan keamanan data akan menjadi sangat penting jika aplikasi ingin mencapai penerimaan yang luas dan penggunaan berkelanjutan yang diperlukan untuk operasi yang efektif (O'Callaghan et al., 2021).

Penerapan big data dan kecerdasan buatan layak untuk bereaksi terhadap pandemi COVID-19 dan berkontribusi pada pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan pengambilan keputusan manajemen peristiwa kesehatan masyarakat di masa depan (Dong et al., 2021). Aplikasi AMARI COVID-19 sendiri, atau aplikasi yang dirilis oleh Departemen Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran (Indonesia) pada pertengahan Maret 2020 untuk kepentingan masyarakat sebagai alat pelaporan dan pemantauan mandiri COVID-19, memiliki peran yang signifikan terhadap efek pencegahan penyebaran virus COVID-19, menunjukkan bahwa

aplikasi diterima secara luas sebagai alat yang dapat membantu dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19 (Nuryanto et al., 2020). Pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia telah berbagai upaya seperti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Pemberantasan sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM yang berlaku pada bulan Juni tahun 2021. Penanganan COVID-19 diupayakan kolaborasi antara pemerintah Taiwan, aktivis digital dan programmer yang menyediakan platform open-source digunakan untuk menyediakan aplikasi ponsel dan ketersediaan masker di pusat distribusi di sekitar masyarakat mereka (Youngs, 2020).

Di tengah berlimpahnya informasi simpang-siur mengenai seluk-beluk COVID-19 diperlukan penjelasan pengetahuan yang memadai terkait penyakit ini untuk bisa melayani masyarakat dengan memadai. Presentase penggunaan internet masyarakat Indonesia yang menepati angka cukup tinggi sehingga media sosial dapat membantu memenuhi tujuan advokasi kebijakan untuk membangun jejaring melalui penggunaan media sosial memiliki keuntungan diantaranya untuk memfasilitasi komunikasi secara lanjut yang kemudian menciptakan situasi yang kolaboratif antara platform dengan jejaringan media sosial. Penggunaan teknologi digital pada masa pandemic COVID-19 sarana utama yang menjadi informasi, layanan dan jual beli. Aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan pemerintah (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk membantu pelacakan dalam rangka menghentikan, mencegah penyebaran wabah COVID-19, selain itu aplikasi ini dipergunakan dalam pelaksanaan survei kesehatan dengan melakukan *Tracing* untuk melakukan pelacakan terhadap masyarakat yang diduga mengidap COVID-19.

Partisipasi *civil society* dalam penanganan COVID-19 mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat dapat berperan dalam penanganan COVID-19. Gagasan *society* sendiri dapat memikul tanggung jawab dalam penanganan COVID-19 dan masyarakat dapat merasakan manfaat ketika terlibat dalam penanganan penyebaran COVID-19 (Juaningsih et al., 2020). Selain itu diperlukan respon *civil society*, menurut teori Behaviorisme Watson (1913,1927) yang melibatkan respon eksplisit (dapat diamati) atau implisit (tidak dapat diamati), pada tingkat linguistic kognitif, proses tindakan yang dapat diamati dan tidak ada respon, namun dapat mendorong tindakan atau ketiadaan tindakan (Staddon, 2021). Akan selalu ada kaitan stimulus dengan respon masyarakat, jika adanya rangsangan yang diterima oleh masyarakat telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari masyarakat (Maknolia & Hidayat, 2020). Sebagai *civil society* yang telah mengetahui tentang suatu informasi tertentu terkait COVID-19 maka *society* akan mampu menentukan dan mengambil keputusan bagaimana harus mengadapinya. Sehingga tujuan penelitian ini bagaimana respon *Civil Society* terhadap aplikasi PeduliLindungi melalui Hastag Twitter #Pedulilindungi.

B. PEMBAHASAN

Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia melalui SK Kepala BNPB Nomor 9.A. tahun 2020, selain itu Presiden menetapkan Keppres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, tanggal 31 Maret 2020 dan Keppres No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020. Untuk membatasi penyebaran penyakit sehingga, sebageian besar pemerintah nasional menerapkan tindakan berupa kebijakan. kebijakan pemerintah Indonesia dalam menekan penularan virus COVID-19 untuk membatasi

mobilitas masyarakat, pada awal pandemi tahun 2020 hingga 1 tahun 2021 kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dimulai dengan istilah PSBB pada April 2020 hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 pada Selasa 26 Juli 2021 presiden telah pemberlakukan kebijakan penerapan PPKM yang berupaya untuk mengurangi penularan COVID-19 dan 24 Desember 2021 akan di terapkan PPKM Level 3 untuk pencegahan adanya gelombang penyebaran COVID-19 pada libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kebijakan dalam pelayanan kesehatan yang dapat dipandang sebagai aspek penting untuk kebijakan sosial Kebijakan pemerintah mengalami disharmonisasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah, perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan *Lockdown* namun, pemerintah pusat menerapkan Pemberantasan Sosial Berkala Besar (PSBB) (Juaningsih et al., 2020).

Dampak yang ditimbulkan adanya pandemic COVID-19 pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, pemerintah harus melibatkan masyarakat *civil society*. *Civil society* menjadi aktor yang penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dalam membantu atau memberikan masukan untuk penyelesaian permasalahan baik dalam lingkungan maupun di pemerintahan. Menurut Gramsci (Nezar, 2009), *civil society* merupakan kelompok yang berkepentingan untuk membentuk *historical block* dalam menghadapi hegemoni negara yang diwarnai oleh control negara yang diwarnai oleh control negara aspek kehidupan, yang dimana *civil society* merupakan aktor penunjang untuk tercapainya pemerintah yang baik bersifat bebas dan mandiri menjadi penyeimbang bagi pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pertukaran sosial ada ketika kelompok pertemuan sosial yang beragam. Diawali dengan *civil society* maju ketika warga negara memegang kekuasaan pengambilan keputusan, bekerja untuk memperkuat dan meningkatkan ekonomi lokal dan regional. Aktivitas keterlibatan *civil society* memiliki hak untuk terlibat dalam semua aspek pemerintahan

politik dan otoritas untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang mempengaruhi semua tingkat kehidupan publik tanpa ada institusi dalam kepentingan kelompok dan individu, dengan kehadiran dan legitimasi otoritas sipil berbasis komunitas melalui sistem pemerintahan politik meningkatkan kemampuan warga negara yang menjalankan kedaulatan atas kebijakan yang berdampak positif. Keikutsertaan *civil society* dalam kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri, keluarga dan masyarakat.

Perkembangan teknologi dinilai berdampak positif dalam menghambat penyebaran COVID-19, selain itu dalam penyebaran informasi positif mampu menekan jumlah masyarakat yang positif COVID-19 (Hua & Shaw, 2020). Media baru dimanfaatkan dalam lingkungan masyarakat dari ekonomi, sosial, politik dan digunakan oleh individu, kelompok, institusi dan lembaga negara sekalipun. Media baru juga berfungsi sebagai pelayanan public oleh institusi maupun lembaga negara (Yuliani et al., 2020). Komunikasi digital berperan dalam membentuk kembali kontrak sosial (Nampoothiri & Artuso, 2021). Teknologi informasi menjadi sarana utama di masa COVID-19, yang dikarenakan menjadi solusi pemerintah untuk mengurangi dampak COVID-19, sehingga segala bentuk pelayanan publik dapat mudah dirasakan masyarakat meskipun tidak harus ke administrasi pemerintah. Salah satu bentuk perubahan nyata yang dirasakan masyarakat pada COVID-19 dan tidak lepas dari keterlibatan *civil society* dalam segala tahapan untuk penanganan COVID-19. Dengan menyampaikan informasi juga harus dilakukan dengan tepat, kekeliruan dalam mengkomunikasikan sebuah informasi bisa menimbulkan ketidakpastian yang malah nantinya akan memperburuk situasi. Melalui komunikasi digital yang sedang digunakan oleh *civil society* yang berkerjasama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menciptakan *mobile application* bernama "PeduliLindungi". Aplikasi PeduliLindungi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan COVID-19.

PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah melakukan pelacakan digital untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Adapun manfaat aplikasi PeduliLindungi yaitu:

1. Memberikan peringatan pada pengguna, PeduliLindungi akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau di kawasan zona merah. Selain itu, pengguna juga akan mendapatkan peringatan jika di lokasi mereka berada terdapat orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan.
2. Pengawasan (*surveillance*), dengan adanya informasi lokasi pengguna yang dibagikan saat bepergian memudahkan pemerintah mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar COVID-19 selama 14 hari ke belakang. Pemerintah jadi lebih mudah mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital.
3. Mengunduh sertifikat vaksin, masyarakat yang sudah disuntik vaksin COVID-19 bisa mengunduh sertifikat vaksin lewat fitur yang ada di aplikasi PeduliLindungi.
4. Informasi hasil tes COVID-19, dalam aplikasi PeduliLindungi juga terdapat fitur yang bisa menunjukkan hasil tes PCR atau swab antigen dari laboratorium yang terafiliasi dengan pemerintah.
5. Sebagai bukti untuk mengakses layanan public, aplikasi ini sangat berguna bagi petugas di bandara, pusat perbelanjaan atau di tempat lainnya untuk mengetahui apakah seseorang udah menjadi program vaksinasi atau belum (covid19.go.id. 2021).

Public by
SAMUDRA PIRU

Dari hasil tracing dan traching yang akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi civil society yang memerlukan penanganan lebih lanjut dalam penanganan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan tepat, sehingga semakin banyak masyarakat berpartisipasi untuk menguduh dan menggunakan PeduliLindungi, maka penanganan penyebaran COVID-19 semakin efektif dan efisien.

Gambar 1. Aplikasi PeduliLindungi



Sumber: <https://PeduliLindungi.id/>

Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi mHealth COVID-19 di Indonesia (Khatulistiwa et al., 2021). Penggunaan aplikasi dilakukan hanya pada masa darurat COVID-19, agar dapat melakukan penelusuran riwayat kontak dengan masyarakat yang terdampak positif COVID-19 dengan Aplikasi PeduliLindungi yang digunakan dalam pelaksanaan survie kesehatan dalam menangani penyebaran COVID-19, dengan menyenggarakan Tracing melakukan pelacakan terhadap masyarakat yang berkontak dengan masyarakat yang diduga positif COVID-19.

Melalui Tracking dapat melacak persebaran COVID-19 dengan mendeteksi masyarakat yang bertemu dengan masyarakat yang positif COVID-19 dan adanya peringatan dan pengawasan dengan membatasi pergerakan masyarakat yang dalam karantina atau isolasi. Aplikasi PeduliLindungi ini diciptakan oleh pemerintah

sebagai mitigasi bencana COVID-19 yang terjadi di Indonesia, dengan cara kerja aplikasi masyarakat dapat mengunduh Aplikasi ini yang diminta untuk mengaktifkan Bluetooth pada ponsel yang diharapkan dengan kondisi Bluetooth aktif maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi posel pengguna melalui PeduliLindungi lainnya yang berada di radius Bluetooth untuk merekam lokasi dan waktu kontakannya. Mekanisme posel yang berdekatan kemudian akan saling merekam ID anonim masing-masing yang akan disimpan dalam rentan waktu 14 hari, sehingga apabila ada seseorang yang dinyatakan sakit oleh petugas kesehatan dan diinput kedalam sistem database, maka sistem akan memfilter ID-ID yang terekam pernah melakukan kontak dengan penderita COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir.

Gambar 2. Jangkauan Pengguna Hastag pedulilindungi



Berdasarkan gambar di atas yang menjelaskan bahwa respon *civil society* terhadap #pedulilindungi di media sosial Twitter, yang menjangkau respon di berbagai daerah di Indonesia. Aplikasi PeduliLindungi diakses oleh *civil society* yang digunakan masyarakat untuk mengakses tempat-tempat publik yang kini disertai QR code, terutama di bandara yang dikarenakan PeduliLindungi juga telah terkoneksi oleh fitur Electronic-Health Alert Card (EHAC) atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik. Aplikasi PeduliLindungi telah digunakan oleh 32,8

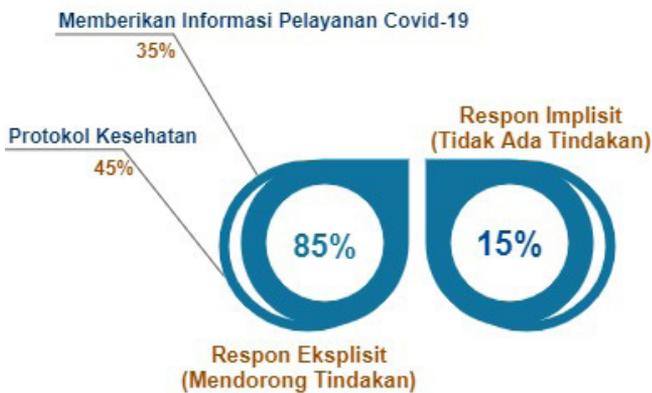
juta pengguna yang rata-rata dengan penambahan pengguna per hari mencapai 500.000 pengguna (Covi19.go.id.2021). Aplikasi PeduliLindungi berperan penting dalam pengendalian pandemic COVID-19 yang akan menjadi syarat untuk akses ke tempat publik. Pengguna Aplikasi juga dapat melihat *permission* yang digunakan oleh PeduliLindungi dan menonaktifkannya kapanpun melalui menu *setting*. Kemudian aplikasi juga memberikan informasi terkait paparan COVID-19 di sekitar dan aplikasi PeduliLindungi juga menggunakan akses lokasi pengguna saat aplikasi dibuka atau dijalankan untuk memberikan informasi mengenai statistik kasus COVID-19.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) berkerja sama untuk mengajak masyarakat mengunduh aplikasi untuk memudahkan pemerintah dalam melacak penyebaran COVID-19 di Indonesia. Upaya pemerintah untuk penanganan COVID-19 termasuk Australia juga menerapkan berbagai pendekatan untuk penanganan COVID-19 Aplikasi yang dinamakan 'Covidsafe' yang berfungsi untuk mengidentifikasi individual yang terpapar COVID-19 (R. Thomas et al., 2020). Pemanfaatan peran teknologi di masa COVID-19 merupakan upaya untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, di berbagai negara yang terdampak COVID-19 telah mengupayakan pemanfaatan teknologi dengan maksimal dengan adanya aplikasi tersebut upaya pemerintah untuk meminimalkan kontak fisik (interaksi) dan penggunaan aplikasi tersebut mengandalkan partisipasi *civil society* untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penyelusuran riwayat kontak masyarakat yang terdampak positif COVID-19.

sosial Twitter diasumsikan sebagai sumber penting dalam mencari informasi ketika pandemi COVID-19 terjadi, perkembangan ini yang menunjukkan bahwa media sosial Twitter sarana informasi *civil society* untuk merespon dengan baik aplikasi PeduliLindungi.

Civil society sebuah ruang organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah dan bersifat independen untuk menjalankan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan menjadi penyeimbang bagi negara ataupun pemerintah (Nampoothiri & Artuso, 2021). Keterlibatan *civil society* dalam sistem pertukaran sosial yang diawali ketika warga negara memegang kekuasaan pengambilan keputusan bekerja untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas sebuah negara. Selain itu, keterlibatan *civil society* memiliki hak untuk terlibat dalam semua aspek pemerintah politik dan otoritas untuk membuat keputusan (Fries & Walkenhorst, 2011).

Gambar 4. Respon Civil Society, Watson (1913,1927).



Data di atas yang menjelaskan respon *civil society* dalam media sosial Twitter terhadap hastag aplikasi PeduliLindungi yang menggunakan teori Behaviorisme Watson (1913,1927) yang melibatkan respon eksplisit (mendorong tindakan) atau implisit (tidak ada tindakan). Kemudian data di ambil melalui media sosial Twitter #peduliLindungi, untuk melihat respon *civil society* terhadap aplikasi tersebut. Data di atas menjelaskan bahwa respon eksplisit 85% dengan indikator protokol kesehatan 45%,

memberikan informasi pelayanan COVID-19 35% dan sedangkan respon implisit 15%. Respon eksplisit membuktikan bahwa *civil society* di dalam media sosial Twitter merespon dengan baik Aplikasi PeduliLindungi bentuk upaya pemerintah memanfaatkan teknologi dalam penanganan COVID-19.

Respon *civil society* terhadap hastag PeduliLindungi merupakan upaya peran aktif yang sangat dibutuhkan sebagai alternatif saluran partisipasi *civil society* ini akan menentukan keberlanjutan dari sebuah proses penanganan yang upayakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. *Civil society* dianggap ada di ruang dalam masyarakat di mana tindakan warga kolektif terjadi atau sering dikaitkan dengan konsensi sejarah, budaya, politik dan interaksi politik dalam konseptualisasi arus utama, terutama dalam demokrasi modern antara pasar dan negara (Setyawan, 2011). *Civil society* dipandang sebagai aktor sentral dalam demokrasi liberal nasional, melalui tradisi demokrasi yang melibatkan pemangku kepentingan telah muncul untuk memberikan kesempatan untuk melegitimasi keputusan kebijakan yang dibuat dalam lingkungan pemerintahan. Pemerintah di beberapa negara menggunakan media sosial untuk penyampaian informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Dengan demikian peranan dari *civil society* menjadi nahkoda utama untuk penanganan COVID-19 melalui aplikasi PeduliLindungi yang berupa upaya pemerintah untuk mengurangi dampak positif dari pandemi COVID-19.

C. KESIMPULAN

Upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi digital di masa pandemic COVID-19 menjadi langkah yang tepat. Dalam era digital, media sosial dijadikan sebagai media partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan masyarakat yang terdampak positif COVID-19. Informasi ini tersedia di aplikasi PeduliLindungi untuk memberikan kewaspadaan kepada *civil society* untuk mengurangi penyebaran virus. Selain itu *civil society* sebagai peranan sentral di sebuah negara yang berperan

penting dalam penanganan COVID-19, Aplikasi PeduliLindungi diciptakan oleh pemerintah sebagai bagian dari mitigasi bencana COVID-19 di Indonesia yang diharapkan mampu mengidentifikasi masyarakat yang pernah berada dalam jarak dekat dengan masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 atau PDP, dan ODP.

Aplikasi PeduliLindungi menjadikan media komunikasi kesehatan oleh pemerintah Indonesia bagi *civil society* dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih menjadi pandemi di beberapa negara termasuk Indonesia. Pemanfaatan aplikasi itu sendiri diikuti dukungan dan edukasi dari kepala daerah dan kepada *civil society* itu sendiri. Dalam penelitian ini menemukan bahwa respon *civil society* terhadap aplikasi PeduliLindungi melalui respon eksplisit 85% yang membuktikan bahwa *civil society* di era digital ini yang menjadikan media sosial sebagai pertukaran informasi mengenai penanganan COVID-19 dari pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan memakai Aplikasi PeduliLindungi untuk mengurangi dampak COVID-19.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A., Bastola, G., Modi, B., Marhatta, A., Belbase, S., Lamichhane, G., Gyawali, N., & Dahal, R. K. (2021). The Impact Of Covid-19 Outbreak And Perceptions Of People Towards Household Waste Management Chain In Nepal. *Geoenvironmental Disasters*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/S40677-021-00188-W>
- Akbar, G. G., Kurniadi, D., & Nurliawati, N. (2021). Content Analysis Of Social Media: Public And Government Response To Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(1), 16–31. <https://doi.org/10.22146/Jsp.56488>
- Dixon, B. E., Grannis, S. J., Mcandrews, C., Broyles, A. A., Mikels-Carrasco, W., Wiensch, A., Williams, J. L., Tachinardi, U., & Embi, P. J. (2021). Leveraging Data Visualization And A Statewide Health Information Exchange To Support Covid-19

Surveillance And Response: Application Of Public Health Informatics. *Journal Of The American Medical Informatics Association*, 28(7), 1363–1373. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocab004>

Dong, J., Wu, H., Zhou, D., Li, K., Zhang, Y., Ji, H., Tong, Z., Lou, S., & Liu, Z. (2021). Application Of Big Data And Artificial Intelligence In Covid-19 Prevention, Diagnosis, Treatment And Management Decisions In China. *Journal Of Medical Systems*, 45(9), 1–11. <https://doi.org/10.1007/s10916-021-01757-0>

Elhadi, M., Msherghi, A., Elhadi, A., Ashini, A., Alsoufi, A., Bin Alshiteewi, F., Elmabrouk, A., Alsuyihili, A., Elgherwi, A., Elkhafeefi, F., Abdulrazik, S., & Tarek, A. (2021). Utilization Of Telehealth Services In Libya In Response To The Covid-19 Pandemic: Cross-Sectional Analysis. *Jmir Medical Informatics*, 9(2). <https://doi.org/10.2196/23335>

Fries, T., & Walkenhorst, P. (2011). *Sharing Global Governance : Shaping A Globalized World*.

Hua, J., & Shaw, R. (2020). Corona Virus (Covid-19) “Infodemic” And Emerging Issues Through A Data Lens: The Case Of China. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 17(7). <https://doi.org/10.3390/ijerph17072309>

Jian, S. W., Cheng, H. Y., Huang, X. T., & Liu, D. P. (2020). Contact Tracing With Digital Assistance In Taiwan’s Covid-19 Outbreak Response. *International Journal Of Infectious Diseases*, 101, 348–352. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.1483>

Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & Nurirfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>

Khatulistiwa, M. B., Wibowo, K. A., & Fuady, I. (2021). Aplikasi Mhealth Covid-19 Di Indonesia : Analisis Konten Menggunakan Mobile Application Rating Scale (Mars). 4(2), 163–172.

SAMUDRA BIRU
Published by

- Maknolia, Y., & Hidayat, D. (2020). Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 Di Kota Bandung. *Mutakalimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 1–7.
- Nampoothiri, N. J., & Artuso, F. (2021). Civil Society's Response To Coronavirus Disease 2019: Patterns From Two Hundred Case Studies Of Emergent Agency. *Journal Of Creative Communications*, 16(2), 203–212. <https://doi.org/10.1177/09732586211015057>
- Nezar, P. (2009). *Antonio Gramsci Negara Dan Hegemoni*. Pustaka Pelajar.
- Nuryanto, A., Setyawan, O., Riana, D., Hadianti, S., Aji, A. M. B., & Pujiastuti, E. (2020). Analysis Of The Amari Covid-19 Application With The Technology Acceptance Model Method. *Journal Of Physics: Conference Series*, 1641(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1641/1/012056>
- O'callaghan, M. E., Buckley, J., Fitzgerald, B., Johnson, K., Laffey, J., McNicholas, B., Nuseibeh, B., O'keeffe, D., O'keeffe, I., Razzaq, A., Rekanar, K., Richardson, I., Simpkin, A., Abedin, J., Storni, C., Tsvyatkova, D., Walsh, J., Welsh, T., & Glynn, L. (2021). A National Survey Of Attitudes To Covid-19 Digital Contact Tracing In The Republic Of Ireland. *Irish Journal Of Medical Science*, 190(3), 863–887. <https://doi.org/10.1007/S11845-020-02389-Y>
- Saleem, J. J., Read, J. M., Loehr, B. M., Frisbee, K. L., Wilck, N. R., Murphy, J. J., Vetter, B. M., & Herout, J. (2020). Veterans' Response To An Automated Text Messaging Protocol During The Covid-19 Pandemic. *Journal Of The American Medical Informatics Association*, 27(8), 1300–1305. <https://doi.org/10.1093/Jamia/Ocaa122>
- Setyawan, D. (2011). Peran Civil Society sebagai Pressure Group Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Studi Pada Malang Corruption Watch [Mcw]) Dody. *Jurnal Reformasi*, 1, 13–22.
- Smoll, N. R., Walker, J., & Khandaker, G. (2021). The Barriers

And Enablers To Downloading The Covidsafe App – A Topic Modelling Analysis. *Australian And New Zealand Journal Of Public Health*, 45(4), 344–347. <https://doi.org/10.1111/1753-6405.13119>

Staddon, J. E. R. (2021). The Role Of Theory In Behavior Analysis: A Response To Unfinished Business, Travis Thompson's Review Of Staddon's New Behaviorism (2nd Edition). *Psychological Record*, 71(3), 473–479. <https://doi.org/10.1007/S40732-020-00409-Y>

Thomas, M. S., & Feng, Y. (2021). Consumer Risk Perception And Trusted Sources Of Food Safety Information During The Covid-19 Pandemic. *Food Control*, 130, 108279. <https://doi.org/10.1016/J.Foodcont.2021.108279>

Thomas, R., Michaleff, Z. A., Greenwood, H., Abukmail, E., & Glasziou, P. (2020). Concerns And Misconceptions About The Australian Government's Covidsafe App: Cross-Sectional Survey Study. *Jmir Public Health And Surveillance*, 6(4), 1–7. <https://doi.org/10.2196/23081>

Youngs, R. (Ed. . (2020). *Global Civil Society In The Shadow Of Coronavirus*. https://Carnegieendowment.Org/Files/Youngs-Coronavirus_Civil_Society_Final.Pdf

Yuliani, F., Adriadi, R., & Safitra, L. (2020). *Media Baru Dalam Pelayanan Publik (Sosial Media Dalam Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Ri Bengkulu)*. 4(2), 149–157.

INDEKS

A

aktor vii, viii, 3, 6, 19, 50, 95, 126,
127, 128, 147, 149, 153, 156,
164, 165, 166, 167, 168, 171,
172, 173, 174, 175, 177, 178,
179, 180, 181, 206, 212, 227,
229, 237, 238, 239, 240, 242,
243, 289, 375, 435, 491, 499,
510, 518
alternatif 28, 51, 145, 158, 221, 439,
455, 457, 499, 523, 524, 543
Anti Politik Uang xiii, 226, 227, 230,
231, 232, 233, 236, 242, 243,
244, 245
aplikasi 76, 136, 333, 345, 463, 466,
470, 471, 479, 485, 487, 488,
489, 490, 493, 494, 495, 496,
497, 498, 499, 500, 540, 541,
542, 545

B

bencana alam v, 89, 141, 142, 161,
209

C

Civil Society vii, 397, 475, 481, 483,
484, 486, 490, 498, 502, 503
Covid-19 v, vii, x, xvi, 2, 3, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 32,
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,

105, 107, 108, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 128, 129, 130, 136, 138,
139, 140, 141, 143, 144, 145,
146, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 181, 201, 202,
203, 204, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 246, 250, 270,
273, 280, 281, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 314, 319,
320, 321, 326, 330, 331, 333,
335, 336, 337, 338, 339, 340,
342, 344, 346, 347, 349, 350,
351, 352, 353, 354, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 402, 403, 404, 405,
412, 413, 415, 416, 418, 419,
420, 422, 423, 424, 425, 426,
429, 430, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 441,
442, 443, 444, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 474, 476, 477,
478, 479, 480, 481, 483, 500,
501, 502, 503, 505, 509, 511,
513, 514, 515, 516, 518, 519,
521, 522, 523, 524, 525, 526,
527, 528, 529, 530, 531, 533,
534, 537, 538, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548

D

dampak ekonomi 95, 99
deliberative 432, 433, 438, 439, 440,
441, 443
demokrasi v, vi, 226, 228, 230, 231,

- 235, 241, 243, 246, 247, 248,
249, 253, 254, 255, 266, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 300,
301, 302, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321,
323, 324, 325, 326, 330, 332,
333, 334, 335, 340, 341, 342,
346, 347, 367, 368, 369, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378,
381, 385, 388, 389, 396, 478,
499
- Desa ix, x, xi, xiii, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 149, 152,
153, 154, 155, 161, 162, 223,
226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 236, 238, 239, 240,
242, 243, 244, 245, 359, 360,
365, 392, 473, 483, 530, 531
- desentralisasi vi, 6, 309, 368, 381,
396, 432, 433, 434, 439, 445,
446
- E**
- e-community 331
- E-Demokrasi 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346,
348
- edukasi 30, 76, 158, 193, 198, 296,
297, 403, 404, 412, 423, 429,
462, 500
- ekonomi ii, vii, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 32, 33, 42, 45, 47, 49, 51,
55, 65, 74, 77, 78, 79, 92, 94,
95, 97, 99, 100, 102, 103, 107,
108, 110, 111, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 129, 130, 133,
137, 138, 149, 165, 167, 168,
171, 172, 173, 175, 176, 179,
186, 187, 203, 208, 209, 211,
219, 226, 228, 239, 253, 254,
255, 289, 309, 312, 313, 314,
318, 319, 320, 321, 324, 331,
344, 349, 351, 352, 353, 354,
355, 362, 363, 365, 370, 371,
375, 378, 387, 442, 443, 447,
460, 461, 478, 479, 480, 491,
492, 524, 532, 533, 535, 544,
547
- eksistensi 31, 34, 41, 43, 92, 165, 179,
312, 324, 369, 396, 514
- e-public 331
- era digital 499, 500
- Evaluasi 230, 236, 452, 455, 457, 458,
461, 465, 469, 473, 539
- e-voting 331
- E-Waste xviii, 451, 462, 463, 465,
466, 467, 469, 472
- F**
- fenomena xiii, 88, 94, 121, 128, 184,
196, 197, 208, 217, 218, 219,
220, 238, 240, 241, 266, 280,
281, 282, 293, 294, 299, 300,
301, 308, 318, 331, 332, 333,
334, 336, 341, 345, 356, 383,
508
- G**
- Gender v, 184, 199, 277, 351, 357,
358, 363, 364, 366
- gerakan 178, 227, 228, 230, 231, 233,
235, 236, 237, 238, 239, 241,
242, 243, 248, 249, 310, 313,
314, 367, 368, 372, 373, 376,
378, 379, 388, 390, 395, 474,
475
- Good governance 63
- Governance v, 45, 64, 81, 83, 84, 85,
86, 113, 118, 162, 165, 174,
182, 239, 244, 482, 501, 522,
545
- H**
- Hak Asasi Manusia x, 281

I

- identifikasi 11, 151, 241, 243, 465, 495, 506
- Implementasi 45, 81, 110, 117, 147, 155, 161, 169, 170, 318, 324, 325, 359, 365, 483
- infografis 404, 541
- Inovasi i, iii, v, vii, 26, 32, 33, 42, 43, 116, 124, 346, 449

K

- kapabilitas 452, 457, 464, 469
- kebijakan publik 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 180, 185, 331, 335, 336
- kesejahteraan sosial 322, 350
- kesenjangan digital 331, 337, 338, 339, 344, 346
- ketimpangan 23, 107, 193, 323, 344, 350, 524
- Kolaborasi 44, 47, 50, 77, 79, 122, 130, 131, 135, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 155, 157, 161, 182, 239, 545
- komprehensif viii, 53, 169, 174, 181, 369, 395, 486
- komunikasi pemerintahan 201, 202, 203, 204, 206, 207, 212, 213, 215, 216, 220, 221
- komunikator 202, 203, 204, 205, 206, 207, 217, 409, 410
- konsepsi 164, 165, 173, 175, 178, 179, 180, 181, 316, 333
- konten 403, 404, 405, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 430
- kontestasi 164, 165, 166, 167, 168, 170, 226, 315, 386
- korupsi 228, 236, 237, 243, 287, 296, 303, 367, 368, 377, 396, 400, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546,

547, 548

- krisis v, 53, 61, 66, 67, 70, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 110, 111, 143, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 248, 350, 375, 433, 434, 438, 441, 442, 444, 447, 505, 523, 526, 532, 533, 543

L

- Liberalisasi 227, 367
- lingkungan 23, 26, 30, 35, 49, 59, 60, 62, 64, 69, 77, 78, 88, 105, 106, 135, 141, 149, 151, 158, 196, 197, 208, 217, 218, 219, 220, 343, 344, 345, 353, 361, 362, 410, 418, 451, 452, 453, 454, 459, 460, 461, 462, 467, 469, 475, 476, 478, 479, 491, 492, 499
- Literasi digital 337, 343, 344

M

- masyarakat vi, 8, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 122, 123, 125, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 194, 197, 198, 202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 219,

220, 226, 227, 228, 231, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 243,
248, 253, 255, 266, 274, 280,
281, 286, 288, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 309, 312, 314,
317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 338, 339, 340, 341, 342,
344, 345, 346, 347, 349, 352,
353, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 367, 368, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 395, 396, 402, 403,
404, 405, 408, 409, 410, 412,
413, 415, 416, 418, 419, 420,
421, 423, 424, 429, 434, 435,
436, 440, 442, 443, 444, 445,
446, 452, 453, 454, 459, 460,
461, 462, 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 470, 471, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 480,
485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 499, 500, 505, 506, 509,
510, 511, 518, 519, 523, 524,
527, 530, 532, 541, 542, 543
media baru 330, 411
media sosial 99, 104, 124, 134, 136,
190, 202, 210, 213, 220, 227,
231, 233, 243, 248, 298, 309,
331, 332, 340, 344, 404, 464,
485, 489, 495, 497, 498, 499,
500, 504, 506, 507, 508, 513,
514, 517, 519
mobilisasi sumber daya 178

N

netizen v, 226, 227, 230, 233, 234,
235, 333
Nvivo 12 plus 230, 330

O

opini v, 146, 158, 299, 318, 365, 398,

504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 515, 516,
517, 518, 519, 520, 548
organisasi 3, 6, 15, 18, 19, 26, 28, 34,
38, 43, 61, 62, 91, 92, 94, 136,
149, 156, 178, 208, 209, 211,
213, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 283, 285, 288, 294, 319,
334, 341, 345, 346, 368, 377,
380, 385, 386, 387, 388, 389,
395, 396, 406, 407, 408, 409,
415, 456, 460, 478, 498, 542
otonomi daerah 369

P

Pandemi v, vii, 11, 15, 20, 21, 37, 43,
44, 45, 47, 50, 55, 57, 64, 70,
72, 74, 81, 82, 88, 94, 98, 100,
108, 109, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 124, 138, 143, 171,
174, 177, 178, 181, 182, 201,
202, 203, 204, 211, 212, 214,
221, 222, 223, 291, 302, 306,
330, 336, 348, 350, 351, 352,
353, 357, 363, 364, 366, 402,
403, 425, 430, 440, 442, 443,
447, 448, 449, 450, 476, 481,
482, 486, 521, 523, 524, 527,
531, 532, 537, 544, 545, 546,
547
pariwisata 24, 39, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 102, 125, 129, 130, 137,
203, 314, 324, 376
partisipasi 28, 42, 126, 152, 178, 202,
210, 220, 227, 254, 283, 284,
307, 309, 315, 317, 318, 321,
331, 332, 334, 335, 337, 341,
355, 409, 441, 446, 475, 477,
496, 499, 506, 508, 514, 519,
541, 543

pelayanan 27, 47, 49, 58, 59, 64, 79, 91, 124, 207, 336, 403, 409, 410, 413, 416, 442, 447, 458, 460, 461, 491, 492, 498

pemerintahan vi, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 54, 63, 87, 93, 95, 97, 99, 130, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 180, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 283, 284, 287, 292, 305, 307, 309, 310, 315, 316, 318, 325, 326, 331, 334, 335, 345, 352, 368, 369, 370, 377, 379, 380, 384, 408, 409, 413, 432, 433, 434, 438, 441, 442, 445, 454, 460, 491, 492, 499, 531, 543

pemimpin 14, 95, 178, 212, 266, 316, 341, 375, 377, 383, 459

pentahelix 122, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 153, 155, 156, 160, 161

penyelenggara 226, 242, 247, 250, 251, 253, 254, 259, 260, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 286

perempuan 153, 183, 185, 186, 195, 198, 303, 323, 324, 333, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 363, 364, 531

Pilkada x, xiv, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 273

R

relasi 6, 164, 167, 168, 171, 174, 175, 178, 180, 193, 254, 349, 350, 369, 486

relevansi 164, 444, 505, 507, 512, 515

represifitas digital 331, 337, 338, 341

reputasi 53, 211, 218, 219, 408

respon v, 50, 61, 76, 97, 100, 104, 184, 226, 227, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 240, 243, 281, 332, 333, 345, 378, 432, 435, 464, 468, 470, 485, 486, 487, 490, 495, 497, 498, 499, 500, 506, 507, 517, 528

S

sentimen 231, 376, 509, 511, 512, 515

smart environment 451, 453, 454, 456

sosialisasi 76, 80, 100, 110, 145, 158, 215, 253, 402, 404, 405, 415, 416, 418, 422, 423, 424, 429, 430, 434, 445, 470

strategi 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 70, 77, 90, 92, 93, 104, 109, 110, 111, 124, 126, 130, 133, 134, 151, 153, 202, 209, 211, 212, 213, 216, 220, 243, 322, 324, 403, 404, 407, 413, 420, 457, 474, 543

Sumber Daya 84, 85, 473

surat suara xiv, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274

sustainability 49, 456

swasta 18, 56, 74, 75, 76, 78, 91, 92, 93, 126, 127, 128, 131, 133, 135, 140, 149, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 239, 240, 289, 324, 346, 362, 529

T

tata kelola v, 40, 41, 50, 53, 54, 57, 64, 67, 78, 87, 93, 95, 165, 166, 180, 215, 216, 255, 305, 325, 362, 434, 540

teknologi 54, 55, 57, 74, 76, 78, 80,

110, 124, 134, 142, 319, 320,
330, 331, 332, 333, 334, 338,
339, 340, 343, 344, 345, 346,
413, 421, 444, 451, 452, 453,
460, 461, 467, 469, 470, 479,
486, 487, 488, 489, 492, 496,
499, 513

Tipologi 7

Twitter 333, 344, 485, 486, 490, 495,
497, 498, 499, 505, 506, 514,
520, 522

V

varian xiv, 32, 102, 106, 179, 247,
250, 251, 256, 257, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 274,
381

W

Website iv, xiv, 81, 400, 403, 404, 412,
413, 418, 419, 422, 424, 429,
430, 521

BIOGRAFI

Dian Eka Rahmawati merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian gender dan politik, civil society, dan komunikasi pemerintahan. Lahir di Kediri, 27 Desember 1974, gelar sarjana diperoleh dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada tahun 1998, pada tahun 2000 mendapatkan gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor didapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Civil Society, Komunikasi Pemerintah dan Metode Penelitian Sosial. Berbagai buku serta publikasi di jurnal nasional dan internasional telah dihasilkan sesuai dengan bidang penelitian dan kompetensinya.

David Efendi merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan area spesialisasi politik lokal, gerakan sosial, *critical discourse analysis*, dan politik ekologi. Gelar *Master of Art* didapatkan dari Universitas Gadjah Mada dan Master kedua dari Universitas Hawaii, Amerika Serikat. Karya telah diterbitkan oleh PolGov UGM pada tahun 2010 dengan judul *The Decline of Bourgeoisie: Runtuhnya Pedagang pribumi Kotagede, buku Muhammadiyah dan Pilpres, Kajian Civil Society*. Buku lain telah diterbitkan adalah *matinya kota, opposing liberal democracy, kampung hijau*, dan beberapa lainnya. Penulis mengeditori beberapa buku dan menulis buku serta mempublikasi hasil riset di jurnal-jurnal bereputasi. Penulis sedang menyelesaikan program

Doktoral Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Aktifitas di luar kampus menjadi tanaga ahli Bappeda DIY, Staf Ahli DPD RI DIY, Tim asistensi keistimewaan DIY, sebagai pengurus PP Muhammadiyah, Menjadi Ketua Serikat Taman Pustaka, Direktur riset di PSM UMY, Ketua riset di LSN, dan Peneliti LP3M UMY.

Awang Darumurti merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian tata kelola pemerintahan kolaboratif. Lahir di Yogyakarta 19 Oktober 1981. Gelar sarjanah di dapat di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005, gelar Master di dapat di Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2007, pada saat ini sedang melanjutkan Program Doktor di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.

Tri Sulistyaningsih merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan spesialisasi penelitian Urban Planing dan Tata Kota. Beliau mendapatkan gelar Doktor di dapatkan dari Universitas Brawijaya. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kota dan Urban Planing.

Ridho Al-Hamdi adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan konsentrasi keilmuan ilmu politik terutama terkait isu partai politik, pemilu, demokrasi serta Islam dan politik. Sejak Februari 2018 hingga buku ini terbit, dia adalah direktur *International Program of Government Affairs and Administration* (IGOV) UMY. Pendidikan doktor di bidang ilmu politik diselesaikan di Universitas TU Dortmund, Jerman (beasiswa BPPLN Kemenristekdikti RI, 2014-2017). Pendidikan sarjana

dan masternya ditamatkan di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada. Sebelum ke jenjang universitas, dia pernah menjadi santri di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada *Spring Season* 2018, dia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Pompeu Fabra, Barcelona, Spanyol atas sponsor Erasmus+ dan *adjunct assistant professor* di Asia University, Taiwan (collaborative grant, 2018). Sejumlah buku pernah ditulisnya, di antaranya *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Graha Ilmu, 2013), *Indonesian Political Ideology: Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015* (Tectum, 2017), *Islam dan Politik di Indonesia: Pemikiran Muslim Modernis Pasca Orde Baru* (Calpulis, 2018), *Epistemologi Oksidentalisme: Membongkar Mitos Superioritas Barat, Membangun Kesetaraan Peradaban* (Samudra Biru, 2019), *Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen* (Lab IP UMY, 2019), *Pemilu 2019 di Mata Milenial: Catatan dari Bilik Suara 17 April 2019* (Lab IP UMY & Samudra Biru, sebagai editor, 2020), *Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis* (IRCISOD, 2020), dan *Ambang Batas Pemilu: Pertarungan antar Partai Politik dan Pudarnya Ideologi di Indonesia* (UMY Press, 2020). Aktif juga menulis artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional maupun internasional yang bisa diakses online serta opini di sejumlah koran harian. Untuk berkomunikasi, bisa melalui e-mail: ridhoalhamdi@umy.ac.id atau bisa dijumpai di <https://ridhoalhamdi.id>.

Muchamad Zaenuri lahir di Kendal, 28 Agustus 1966. Pendidikan SD sampai dengan SMA diselesaikan di Kendal Jawa Tengah. Menamatkan pendidikan SD Pegulon 1 Kendal pada tahun 1979, SMP Negeri 2 Kendal pada tahun 1982 dan SMA Negeri Kendal pada tahun 1985. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas kemudian menempuh program S.1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan di Program S.2 Administrasi Publik UGM dan lulus tahun 2003. Pada tahun 2016 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi

Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 1994 hingga sekarang menjadi dosen tetap di UMY. Disamping menjadi dosen tetap di UMY, sejak tahun 2014 hingga sekarang menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Konsultan Indonesia (DPD Perkindo) DIY, dan sejak tahun 2017 hingga sekarang menjadi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Mengajar mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan, Tata Kelola Bencana dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Buku yang pernah ditulis antara lain: *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah*, *Manajemen SDM Pemerintahan* dan *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance*.

Rahmawati Husein merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Bencana dan Local Government. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dan Doktor di raih di Amerika Serikat. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Bencana dan Penelitian Kuantitatif.

Sanny Nofrima merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana (S1) di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019 dan gelar Master (S2) di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 2021. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Bambang Eka Cahya Widodo merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi Pemilu dan Partai Politik. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Studi Demokrasi dan Tata Kelola Pemilu.

Juhari Sasmita Aji merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Proses Legislasi, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan.

Suswanta merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Pemerintah Desa, Politik Islam. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Pemerintah Desa dan Penelitian Kualitatif.

Muhammad Sokarno merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan baik

regional, nasional maupun internasional, selain itu juga aktif untuk menulis dan dipublikasikan.

Aprilianto Satria Pratama merupakan Mahasiswa Program Master di Universitas Gadjah Mada. Selain itu penulis juga aktif dalam melakukan publikasi di media online.

Bachtiar Dwi Kurniawan merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Kepemimpinan dan Civil Society. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, gelar Master dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Kepemimpinan Pemerintahan, Tata Kelola Informasi Pemerintahan.

Ummiy Zakiya merupakan Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Gelar sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di raih di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu beliau juga Aktif dalam publikasi di jurnal maupun prosiding nasional dan internasional.

Muhammad Eko Atmojo merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan fokus kajian penelitian tata kelola sumber daya manusia, kebijakan public, merit system, netralitas birokrasi dan politisasi birokrasi. Gelar Sarjanah (S1) Ilmu Pemerintahan didapat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2013, sedangkan untuk Gelar Master (S2) Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan penulis mengampu Mata

Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan, Birokrasi Pemerintahan, Studi Konstitusi dan Lembaga Negara, dan Bahasa Indonesia (Penulisan Karya Ilmiah). Penulis aktif melakukan penelitian setiap tahunnya diantaranya adalah sebagai berikut: *Mekanisme Pengisian Pejabat Struktural Eselon II Melalui Lelang Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018*, *Analisis #JagaASN sebagai Media Kampanye Netralitas Birokrasi di Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Selain itu beliau juga aktif menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional, serta menjadi Reviewer Jurnal Nasional Terakreditasi di berbagai Universitas di Indonesia.

Tunjung Sulaksono merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Partai Politik dan Gerakan Sosial. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Studi Partai Politik, Tata Kelola Pemilu.

Herdin Arie Saputra merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana (S1) di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master (S2) di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Penulis mempunyai pengalaman menjadi Asisten Riset, Asisten Peneliti Lembaga Strategi Nasional dan mengikut beberapa konferensi Internasional. Di samping itu beberapa tulisan beliau telah diterbitkan jurnal nasional dan internasional.

M. Daimul Abror merupakan Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri dengan spesialisasi penelitian Pemerintahan Daerah Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah, Kebijakan Publik. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Airlangga pada tahun 2008, gelar Master dari Universitas Mardeka Malang pada tahun 2011 dan gelar Doktor Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Selama mengajar di Program Studi Administrasi Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Pelayanan Publik, Kebijakan public.

Rossi Maunofa Widayat merupakan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan spesialisasi penelitian Media Sosial dan Politik. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, gelar Master dari Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama mengajar di Program Studi Administrasi Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Birokrasi Indonesia dan Manajemen Pelayanan Publik.

M. Lutfie Khoiri merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ganapati Sjastru Satyani merupakan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Kendal Bidang Teknologi Informasi, ganapati.satyani5@gmail.com.

Fauzan A Sandiah merupakan Pegiat dari Rumah Baca Komunitas, penulis telah mendapatkan gelar sarjana dan magister dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan di Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan LHKP PP Muhammadiyah.

PUBLISHED BY
SAMUDRA PERU

Prawirayudha Pratama merupakan Alumni Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mendapatkan gelar sarjana di Universitas Mulawarman. Saat ini beliau merupakan Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional dan internasional.

Bachtiar Dwi Kurniawan merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Politik dan Kebijakan Publik. Gelar sarjana di dapat dari UIN Sunan Kalijaga, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Penulis sedang menyelesaikan program Doktorat Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Administrasi Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Sosiologi Pemerintah, Ekonomi Politik Pemerintahan dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

Utami Nur merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan baik regional, nasional maupun internasional, selain itu juga aktif untuk menulis dan dipublikasikan

Tatryana Rendi Ziar Zhafira merupakan salah satu alumni dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang saat ini menjadi salah satu asisten peneliti di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lahir di Jakarta 28 September 1999, serta sekaligus alumni dari Program

Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017.

Tiara Khariunnisa merupakan salah satu mahasiswa Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan program studi Ilmu Pemerintahan. Gelar Strata satu di dapat pada tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan program studi Ilmu Pemerintahan. Penulis lahir 16 Januari 2000 di Samarinda, Kalimantan Timur, serta memiliki minat dalam bidang penulisan ilmiah sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya.

Helen Dian Fridayani merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun. Sekarang penulis sedang menyelesaikan pendidikan doctor pada Program Studi Ekonomi Politik, Universitas Nasional Cheng Kung (NCKU), Taiwan dan sebagai Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Vindhi Putri Pratiwi merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019 dan gelar Master di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 2021. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional dan internasional.

Suswanta merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Pemerintah Desa, Politik Islam. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Pemerintah Desa dan Penelitian Kualitatif.

Moch Edward Trias Pahlevi merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional. Saat ini penulis sebagai Koordinator Komite Independen Sadar Pemilu.

Sakir merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Bencana dan Keuangan Publik. Adapun gelar sarjana di dapat dari Program Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013, pada tahun 2015 mendapatkan gelar Master dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pemerintah.

Titin Purwaningsih merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Politik Dinasti, dan Gender. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Proses Legislasi dan Studi Partai Politik.

Azka Abdi Amr Robbins merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di dapat dari Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Peneliti di Komite Independen Sadar Pemilu.

Fajar Apriani merupakan Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Mulawarman dengan spesialisasi penelitian *Public Administration, Public Policy and Gender*. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Mulawarman, gelar Master dari Universitas Mulawarman dan Gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin. Selama mengajar di Program Studi Administrasi Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Kebijakan public, Keuangan negara dan Administrasi keuangan negara dan daerah.

Reazha Nur Oktavianti merupakan Alumni Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yeni Rosilawati merupakan Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian *CSR, Public Relations and Organizational Development*. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar PhD dari *University Sains Malaysia*. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Strategi dan taktik public relations, komunikasi organisasi dan pengantar public relations.

Misran merupakan mahasiswa program studi magister ilmu pemerintahan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan spesialisasi penelitian komunikasi pemerintahan, dan kebijakan public. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) dan saat ini sedang melanjutkan studi master di universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Lantip Fajar Utomo merupakan Temporary Staff Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga merupakan alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan baik di kampus maupun di luar lingkungan kampus. Semasa kuliah melakukan penelitian yang berfokus pada gerakan sosial dan ketahanan pangan.

Husni Amriyanto merupakan Dosen di Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedang menyelesaikan Program Doktor Politik Islam di UMY.

Bubu Alim Swarga atau kerap disapa Bubu merupakan seorang peneliti di Pusat Studi Muhammadiyah (PSM). Pria asal Sulawesi Selatan ini memiliki fokus penelitian pada Politik Lokal, Kebijakan Publik, Perbandingan Politik dan Politik Internasional di Asia

Pasifik. Setelah menyelesaikan studi S1 di Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ia melanjutkan S2 Studi Asia Pasifik di Thammasat University, Thailand dengan mendapatkan full beasiswa Thai Royal Government Scholarship dari Pemerintah Thailand.

Melania Novitasari merupakan mahasiswa Progtam Study Administrasi Publik, Semester 6 di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Lahir di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta, 4 Januari 2000. Ia juga bergabung dalam Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tulisan ini berangkat dari keresahan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di lingkup perguruan tinggi.

Eli Kardilla merupakan mahasiswa Administrasi Publik semester 6 Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Lahir di Berau, 06 November 2000. Ia merupakan mahasiswa yang aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tulisan ini berangkat dari keresahannya terkait sistem pencegahan dan penanganan kejahatan seksual yang terkesan tidak pro kepada korban. Maka dari itu tulisan ini hadir berangkat dari urgensi Permendikbud No. 30 yang perlu disahkan dan disempurnakan untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan nyaman.

Buku *Demokrasi dan Civil Society: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia* ini mewadahi empat bab pembahasan. Pada bab pertama diberikan judul *Governance, Krisis, dan Inovasi di Masa Pandemi Covid-19* memuat sembilan artikel yang sebagian disatukan oleh gagasan tentang tata kelola atau kolaborasi dan beragam model inovasi serta sebagian ditulis dalam konteks respons atas krisis yang terjadi baik bencana alam atau bencana pandemi yang sejatinya tak dapat dipisahkan dari kondisi ekologi secara holistik.

Pada bab kedua disematkan judul *Politik Elektoral di Masa Pandemi Covid-19* memuat dua tulisan yang sangat monumental perihal praktik demokrasi elektoral dan evaluasi pemilihan yang terdiri dari tulisan Bambang Eka dan Edward Trias P. yang mengoreksi praktik desa anti-politik uang perspektif netizen dengan mendayagunakan kecanggihan mesin pelacak opini media. Sementara Ridho Al-Hamdi dan Sakir menganalisis faktor penyebab suara tidak sah dalam pilkada serentak di era pandemik khususnya di Kabupaten Sleman.

Bab ketiga menghadirkan lima buah tulisan dikerangkai dalam judul bab *Demokrasi dan Gender di Masa Pandemi Covid-19*. Demokrasi yang dibaca secara langsung dan menggunakan mesin digital atau mengobservasi keragaman dinamika demokrasi di ruang-ruang *cyber politics*, juga pembacaan dalam konteks politik lokal di era desentralisasi sangat menarik karena keragaman situasi politik lokal.

Terakhir adalah Bab 4 terdiri dari tujuh artikel yang mendiskusikan peran masyarakat sipil, kekuatan-kekuatan demokratis, dan arus informasi komunikasi di saat pandemi yang mengisyaratkan bahwa diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas kekuatan, dan gagasan demokratisasi informasi untuk mendapatkan ketangguhan masyarakat dan tata pemerintahan yang partisipatif.

